

AKTOR NON-NEGARA
Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional
di Asia Tenggara

AKTOR NON-NEGARA

**Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional
di Asia Tenggara**

Penyunting:

Poltak Partogi Nainggolan

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2017

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara/
Poltak Partogi Nainggolan (peny.)—Ed. 1; Cet. 1.—Jakarta : Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2017.

xii + 228 hlm; 15,5 x 23 cm

ISBN 978-602-433-575-5

Judul:

Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara
Poltak Partogi Nainggolan (peny.)

Copyrights © 2017

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Penerbitan ini atas kerja sama
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2017

YOI: 1465.36.19.2018

Desain sampul: Iksaka Banu

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jln. Plaju No. 10, Jakarta 10230
Telepon: (021) 31926978, 31920114
Faksimile: (021) 31924488
Email: yayasan_obor@cbn.net.id
Website: www.obor.or.id

KATA PENGANTAR

Aktivitas para aktor non-negara yang beragam di kawasan Asia Tenggara menarik perhatian kami untuk diteliti, karena, selain masalahnya yang luas, implikasinya juga begitu kompleks. Berbeda dengan di masa-masa sebelumnya, perkembangan peran aktor non-negara ini semakin dominan dalam hubungan internasional dewasa ini, sehingga kian menggeser peran aktor negara yang telah memainkan peranan sentral, menjadi fokus dan begitu penting selama ini. Parlemen (DPR) sebagai pusat pembuatan kebijakan dihadapkan pada masalah yang kian banyak melibatkan para aktor non-negara ini dengan segala akibat yang dihasilkan mereka.

Kegiatan penelitian ini bertujuan mengetahui aktivitas lalu-lintas manusia lintas-batas di kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, yang banyak dilakukan para aktor non-negara dewasa ini dan segala implikasi yang ditimbulkannya dalam hubungan antarnegara. Hasil penelitian yang disusun menjelaskan pula bagaimana lalu-lintas manusia ke dan dari wilayah Indonesia dan implikasinya terhadap hubungan antarnegara di Asia Tenggara. Analisis penelitian mengungkapkan eksistensi dan peran aktor non-negara dalam berbagai kompleksitas masalah yang timbul kemudian, serta peran negara dan pemerintah, termasuk kerja sama di antara mereka, di kawasan dalam mengatasinya.

Aktivitas lalu-lintas manusia di kawasan membawa konsekuensi diperlukannya penelitian lebih banyak lagi mengenai aktivitas lalu-lintas para aktor non-negara, baik secara legal maupun ilegal, yang dilakukan oleh TKA, TKI, turis, penyelundup manusia, pengungsi, pencari suaka, penyelundup narkoba, pelaku pedofilia,

orang asing pemilik properti, pencuri ikan, aksi-aksi terorisme, dan beberapa pelaku kejahatan transnasional lain yang mengemuka dewasa ini. Penelitian ini juga dilakukan untuk merespons kebutuhan kebutuhan Komisi I, II, III, dan VIII DPR, terhadap data mengenai perkembangan masalah lalu-lintas manusia di kawasan dewasa ini. Data ini berusaha merespons kebutuhan para anggota parlemen tersebut dalam implementasi tugas-tugas mereka terkait legislasi, anggaran dan pengawasan, terutama dalam hubungannya dengan masalah keamanan, ekonomi, dan sosial.

Hasil penelitian ini, baik secara lengkap maupun ringkasan eksekutifnya, pada awalnya diberikan kepada komisi-komisi DPR dan alat kelengkapan lainnya, terutama Komisi I, II, III, IV, dan VIII, serta BKSAP, serta individu anggota DPR yang membutuhkannya untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka. Mengingat isinya yang penting dan relevan bagi kalangan akademisi/kampus dan umum, hasil penelitian ini dipublikasikan lebih luas ke masyarakat, terutama ke berbagai perpustakaan umum, universitas, dan pusat penelitian, dalam wujud buku bunga rampai ini. Adapun seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti (Masalah-masalah) Hubungan Internasional di Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan (BKD), yang terdiri dari Poltak Partogi Nainggolan, Simela Victor Muhamad, dan Sita Hidriyah.

Kehadiran peneliti dari luar institusi penelitian di DPR, yang juga pengajar di universitas, dan penulis yang sangat aktif menganalisis masalah-masalah hubungan internasional kontemporer di media massa, yaitu Dinna Wisnu, selain memberi nilai tambah atas isi buku ini, juga menyumbangkan inspirasi lebih luas bagi pengembangan penelitian terhadap isu yang dibahas, di masa depan. Kesediaan beliau untuk menyumbangkan esainya di bagian Prolog sangat dihargai. Karena, di tengah-tengah aktivitasnya yang sangat padat dalam mengajar dan menulis di berbagai tempat, ia masih mau memberikan

KATA PENGANTAR

waktunya untuk bisa menyelesaikan esainya ini, walaupun waktu yang diberikan sangat singkat.

Akhirnya, dengan menyadari tidak luputnya buku publikasi ini dari kekurangan, yang menjadi tanggung jawab masing-masing penulisnya, dan juga saya sebagai penyunting, kami menyampaikan buku ini kepada khalayak ramai. Kami menyambut baik segala penilaian, masukan, kritik dan saran yang diberikan terkait dengan tema-tema dan hasil riset dan publikasi institusi penelitian kami di masa mendatang. Kami menyadari hasil yang lebih baik hanya dapat diperoleh dari adanya refleksi dan evaluasi kontinyu dari pekerjaan yang telah dilakukan. Semoga, kehadiran buku ini dapat menambah kajian yang sudah ada mengenai kehadiran dan peran aktor non-negara dalam disiplin hubungan internasional.

Jakarta, Oktober 2017

Penyunting

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | v |
| Prolog: | |
| Belajar dari Situasi di Rakhine: Tantangan Mengatasi Pergerakan Manusia di Kawasan | |
| <i>Dinna Wisnu</i> | 1 |
| Bab 1. Pendahuluan | 3 |
| Bab 2. Kondisi Rakhine | 6 |
| Bab 3. Pelajaran dari Rakhine | 13 |
| Bab 4. Penutup | 16 |
| Bibliografi | 20 |
| | |
| <i>Bagian Pertama</i> | |
| Tantangan Indonesia dalam Memberantas Kejahatan Perdagangan Orang di Kawasan | |
| <i>Sita Hidriyah</i> | 21 |
| Bab 1: Pendahuluan | 23 |
| Bab 2: Tantangan Pemberantasan Perdagangan Orang di Kawasan | 30 |
| Bab 3: Tantangan Indonesia dalam Pemberantasan Perdagangan Orang | 35 |
| I. Luasnya Wilayah ASEAN | 37 |
| II. Kompleksitas Permasalahan Negara Perbatasan | 37 |
| III. Korban Perdagangan Orang yang Tidak Teridentifikasi | 41 |

| | |
|--|-----|
| Bab 4: Kesimpulan | 44 |
| Bibliografi | 46 |
| | |
| <i>Bagian Kedua</i> | |
| Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya | |
| <i>Simela Victor Muhamad</i> | 49 |
| Bab 1: Pendahuluan | 51 |
| I. Latar Belakang | 51 |
| II. Permasalahan | 53 |
| III. Metodologi Penelitian | 55 |
| Bab 2: Tinjauan Pustaka | 57 |
| Bab 3: Penyelundupan Narkoba sebagai <i>Transnational Organized Crime</i> | 62 |
| I. Temuan di Provinsi Bali | 68 |
| II. Temuan di Provinsi Kepulauan Riau | 70 |
| Bab 4: Upaya Penanganan | 75 |
| Bab 5: Kesimpulan | 80 |
| Bibliografi | 82 |
| | |
| <i>Bagian Ketiga</i> | |
| Aktivitas <i>Non-State Actors</i> dan Dampaknya dalam Hubungan Internasional di Kawasan | |
| <i>Poltak Partogi Nainggolan</i> | 85 |
| Bab 1: Pendahuluan | 87 |
| I. Latar Belakang | 87 |
| II. Tinjauan Pustaka | 91 |
| III. Metodologi Penelitian | 96 |
| Bab 2: Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Mancanegara | 99 |
| Bab 3: Kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal | 107 |
| I. TKA di Indonesia | 107 |

| | |
|--|-----|
| II. Penguasaan Properti oleh TKA | 114 |
| Bab 4: Penyelundupan Narkoba | 116 |
| Bab 5: Aktivitas Lintas-Batas dan Kejahatan Transnasional Lain | 135 |
| I. Perdagangan Orang | 136 |
| II. Aktivitas Turisme | 140 |
| III. Prostitusi dan PSK | 141 |
| IV. Kejahatan Pedofilia | 142 |
| V. Pengungsi dan Pencari Suaka | 145 |
| VI. Terorisme Internasional | 149 |
| VII. Pencurian Ikan (<i>Illegal Fishing</i>) | 152 |
| Bab 6: Aktor Non-Negara dan Kejahatan Finansial dan Penyelundupan | 155 |
| Bab 7: Penanganan Pekerja Migran (Ilegal) dan Hubungan Antarnegara | 161 |
| Bab 8: Penanganan Kejahatan Narkoba dan Hubungan Antarnegara | 172 |
| Bab 9: Penanganan <i>Human Trafficking</i> dan Terorisme Internasional dan Hubungan Antarnegara | 181 |
| I. Penanganan <i>Human Trafficking</i> | 181 |
| II. Penanganan Terorisme Internasional | 186 |
| Bab 10: Penanganan Pencurian Ikan (<i>Illegal Fishing</i>), Aktivitas Turisme dan Pengungsi/Pencari Suaka dan Hubungan Antarnegara | 191 |
| I. Penanganan Pelaku Pencurian Ikan (<i>Illegal Fishing</i>) dan Perompakan | 191 |
| II. Penanganan Pelanggaran Aktivitas Turisme | 194 |
| III. Penanganan Pengungsi dan Peminta Suaka | 196 |
| Bab 11: Penutup | 199 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| Bibliografi | 205 |
| Epilog | 215 |
| <i>Poltak Partogi Nainggolan</i> | |
| Indeks | 221 |
| Tentang Penulis | 228 |

Prolog

**BELAJAR DARI SITUASI DI RAKHINE:
TANTANGAN MENGATASI PERGERAKAN
MANUSIA DI KAWASAN**

Oleh: Dinna Wisnu

BIBLIOGRAFI

B u k u

- Acharya, Amitav (2012). *The Making of Southeast Asia: International Relations of a Region*. Singapura: ISEAS.
- Assad, Muhammad Haidar (2014). *ISIS: Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini*. Jakarta: Zahira.
- Djelantik, Sukawarsini (2010). *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Heijmans, Annelies, Nicola Simmonds, dan Hans van de Veen (2014). *Searching for Peace in Asia Pacific: An Overview of Conflict Prevention and Peacebuilding Activities*. London, Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Jemadu, Aleksius (2014). *Politik Global dalam Teori dan Praktek*, Edisi ke-2, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jones, David Martin (2004). *Globalisation and the New Terror: The Asia Pacific Dimension*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Kleinen, John dan Manon Osseweijer (2010). *Pirates, Ports, and Coasts in Asia: Historical and Contemporary Perspectives*. Singapura: ISEAS.
- Lister, Charles R (2015). *The Syrian Jihad*. Oxford: Oxford University Press.
- Nicholson, Michael (1998). *International Relations*. London: Macmillan Press Ltd.
- Simonsen, Clifford E. dan Jeremy R. Spindlove (2004). *Terrorism Today: The Past, the Players, the Future*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Singh, Daljit (2009). *Terrorism in South and Southeast Asia in the Coming Decade*. Singapura: ISEAS.
- Singh, Daljit dan Veena Nair (2015). *Southeast Asian Affairs*. Singapura: ISEAS.
- Snowden, Lynne L. dan Bradley C. Whitsel (2005). *Terrorism: Research, Readings, and Realities*. New Jersey: Prentice Hall.
- Stern, Jessica dan J.M. Berger (2015). *ISIS: The State of Terror*. Ecco: Wiliam and Collins.

- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi (1993), *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, Edisi ke-2, Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon.
- _____. (1987), *International Relations Theory*, New York
- Whitetaker, David J. (2004). *Terrorist and Terrorism in the Contemporary World*. London: Routledge.

Jurnal

- Amri, Ahmad Almaududy (2015), "People smuggling in Southeast Asia: trends, challenges and way forward," *Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs*, 7.2, Abingdon: 132-151.
- Bardsley, Douglas K dan Graeme J. Hugo (2010). "Migration and climate change: examining threshold of change to guide effective adaptation decision-making," *Population and Environment*. 32.2-3 (Dec.), New York: 238-262.
- Bonanno, Gianluca (2014), "Non-Traditional Security in Asia: Issues, Challenges and Frame-work for Action," *Southeast Asian Studies*, 3.3, Kyoto: 698-702.
- Chalamwong, Yongyuth dan Sujittra Rodsomboon (2007). "Expanding the Number of Semi-skilled and Skilled Emigrant Workers from Southeast Asia to East Asia," *TDRI Quarterly Review*; 22.4 (Dec.) Bangkok: 3-9.
- Jaya Ramji-Nogales (2016). "Freedom of Movement and Undocumented Migrants," *Texas International Law Journal*, Austin: University of Texas, Austin, School of Law Publications, Inc.
- Mckeown, Adam (2007). "Regionalizing World Migration," *International Review of Social History* 52 (Apr.). Cambridge: 134-142.
- Molland, SverreAu (2014), "An Atlas of Trafficking in Southeast Asia: The Illegal Trade in Arms, Drugs, People, Counterfeit Goods and Natural Resources in Mainland Southeast Asia," *Southeast Asian Studies*, 3.2, Kyoto: 444-447.
- Nathan, K S (2015). "The Indian diaspora in Southeast Asia as a strategic asset of India's foreign and security policy: a Malaysian perspective," *Diaspora Studies*, 8.2. Abingdon: 120-13.
- Renshaw, Catherine. "Human Trafficking In Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance," *Michigan Journal of International Law*, Vol.37, Summer 2016: 611- 659.

- Rueland, Jürgen (2016). "Democratizing Foreign-Policy Making in Indonesia and the Democratization of ASEAN: A Role Theory Analysis," Sogang University: Institute for East Asian Studies: 1-25.
- Shipper, Apichai W (2010). "Politics of Citizenship and Transnational Gendered Migration in East and Southeast Asia," *Pacific Affairs*, 83.1 (Mar). Vancouver: 11-29, 2,5.
- Teoh, Karen M (2012). "Migration and Diaspora in Modern Asia," *Journal of World History*. 23.4 (Dec.). Honolulu: 991-995.
- Werz, Michael and Hoffman, Max (2015). "Climate Change, Migration, and the Demand for Greater Resources: Challenges and Responses." *The SAIS Review of International Affairs*, 35.1 (Winter/Spring). Baltimore: 99-108.

Makalah

- Khumaidi, Ahmad. 2017, "Kompleksitas Penanganan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi," Jakarta: Ditjen Imigrasi.
- "Penjelasan Kapolda Bali, Jawaban atas Pertanyaan," 2017, Bali: Mapolda Bali, 22 Maret. "Jawaban atas Pertanyaan untuk Bea-Cukai Provinsi Bali," 2017, Bali, Bea Cukai Provinsi Bali, NTB, dan NTT, 23 Maret.
- "Tata Cara Perijinan Tenaga Kerja Asing," makalah FGD Kemenaker di Puslit BKD DPR pada 15 Maret 2017.
- "Makalah Presentasi Kepala BNNP Kepri," disampaikan dalam presentasi di kantor BNPP Kepri, Kota Batam, 18 Mei 2017.
- "Makalah Presentasi Kepala Kantor Bea-Cukai Batam," disampaikan dalam presentasi di kantor Bea-Cukai Batam, Kota Batam, 18 Mei 2017.

Majalah

- "Ancaman Pemangsa dari Dunia Maya," majalah *Tempo*, 2 April 2017: 76-77.
- "Dari Internet ke Interseks," majalah *Tempo*, 2 April 2017: 78-79.
- "Lonjakan Tenaga Kerja Asing ke Indonesia," *Parlementaria*, Edisi 145, Th. XLVII, 2017: 6-7.
- "Pengawasan WNA Harus Libatkan Lintas Sektor," *Parlementaria*, Edisi 145, Tahun XLVII, 2017: 22-23.
- "Sejoli Pengontrol Grup Loli," majalah *Tempo*, 2 April 2017: 72-75.
- "TKA Ilegal Itu Ada," *Parlementaria*, Edisi 145, Th. XLVII, 2017: 20-21.
- "4,026 Kg Sabu Sepanjang Maret 2016," *Instara*, April 2016/II: 24-25.

Surat kabar

- "Aksi Penggrebekan Imigran Ilegal Berlanjut," *Kompas*, 13 Juli 2017:10.
- "Amankan Perbatasan Laut, Lanal Tambah Armada," *Radar Nunukan*, 1 Agustus 2017: 1 & C4.
- Anya, Agnes. "Moratorium in RI's hands, says official;" *The Jakarta Post*, 23 Februari, 2018: 2.
- "Aturan Paspor Rp. 25 Juta Rawan Diakali," *Koran Sindo*, 20 maret 2017: 1 dan 15.
- "Australia-Indonesia Ajak Pengusaha Lawan Perdagangan Manusia," *Rakyat Merdeka*, 26 Agustus 2017: 10.
- "Bahan PCC Dipasok dari Singapura," *Koran Jakarta*, 17 Oktober 2017: 2.
- "Baru 86.000 Pekerja Migran Terdaftar di KBRI," *Kompas*, 27 Maret 2017: 9.
- "Bawa 1,9 Kg Sabu dari Malaysia, TKI Ditangkap," *Suara Pembaruan*, 30 Agustus 2017: 20.
- Batu, Safrin La, Fadli dan Marguerite Afra Sapiie."Batam office flags those palnning to go to M. East," *The Jakarta Post*, 17 Mei 2017: 2.
- "Bawa 30 Peluru "Airsoft Gun", Dua Warga Malaysia Ditangkap TNI," *Kompas*, 17 April 2017: 2.
- "BNN: Malaysia Beri Akses Narkoba ke Indonesia: Ada Misi Menghancurkan Generasi Muda RI," *Suara Pembaruan*, 23 Agustus 2017: 28.
- "BNN: Ridho Tak Akan Direhabilitasi," *Kompas*, 29 Maret 2017: 15.
- "Datang Bergelombang, Suku Uighurs Lantas Bergabung dengan Santoso," *Koran Jakarta*, 28 April 2016: 3.
- "Empat Saksi Kuatkan Bukti Perkara TPPO," *Radar Nunukan*, 3 Agustus 2017: 1 & C4.
- Gunawan, Apriadi."Member of Malaysian drug network shot to death," *The Jakarta Post*, 18 April 2017: 8.
- Harruma, Isshima."Polda Sumut Tenggelamkan 7 Kapal Pencuri," *Republika*, 2 April 2017: 3.
- Hermawan, Erwan."BNN: 250 Ton Sabu dari Cina Berdear di Indonesia," *Koran Tempo*, 31 Juli 2017: 5.
- Ilham."Narkoba Ancaman Nomor Satu," *Halauan Kepri*, 17 Mei 2017: 11.
- "Imigrasi Cegah TKI ke Timur Tengah," *Kompas*, 18 Maret 2017: 22.
- "Indonesia Wajib Waspada Pedofil," *Media Indonesia*, 16 April 2017: 6. uari 2018.: 1 & 15.

- "Jokowi Minta Bandar Narkoba Ditembak Mati," *Rakyat Merdeka*, 22 Juli 2017: 6.
- "Kapal Asing Ilegal Memalsukan Identitas," *Kompas*, 22 Maret 2017: 18.
- "Karimun-Bintan Jalur Masuk Narkoba," *Kepri Raya*, 15 Mei 2017: 1 & 18.
- "Kasus Adelina: Malaysia Tidak Peduli terhadap Martabat dan Hak Pekerja Migran," *Koran Jakarta*, 26 Februari 2018: 12.
- "Kasus Kepemilikan Kokain: Mantan Istri Sebut Faliq Idap Bipolar," *Bali Post*, 22 Maret 2017: 3.
- "Kejahatan Perikanan: Negara Tak Boleh Kalah," *Kompas*, 2 April 2017: 1 & 15, *loc.cit.*
- "Komisi HAM Malaysia Laporkan 600 Kematian," *Republika*, 5 April 2017: 7.
- Kompas*, 17 Mei 2016: 3
- "Lebih 600 WNI Ikut Bertempur," *Republika*, 6 April 2017: 21.
- Lema, Karen dan Martin Petty," *Duterte to use troops in drug war, to kill more*," *The Jakarta Post*, 3 Januari 2017: 10.
- "LMB Nilai Peredaran Narkoba di Karimun Mengkhawatirkan," *Haluan Kepri*, 16 Mei 2017: 20.
- "Ratusan Imigran Demo Minta Pindah," *Kepri Raya*, 16 Mei 2017: 17-18.
- Mabruroh. "Bandar Narkoba Bidik Semua kalangan," *Republika*, 27 Maret 2017: 1.
- "Malaysia Deportasi 611 TKI Ilegal," *Koran Jakarta*, 14 Juli 2017: 2.
- "Malaysia Tingkat Teratas Kasus Pornografi Anak Daring," *Suara Pembaharuan*, 31 Januari 2018:14.
- "Malaysia Tangkap 10 WNI Perompak Kapal Tanker," *Suara Pembaruan*, 8 September 2017: 17.
- "Malaysia Tangkap Ratusan WNI," *Kompas*, 9 Juli 2017: 15.
- Mansur, Ali. "Indonesia Darurat Narkoba," *Republika*, 25 Februari 2018: 3.
- "Miras Selundupan Terbesar: Lima Kontainer Senilai Rp. 26,36 Miliar Diamankan," *Suara Pembaruan*, 18 September 2017: 28.
- "Napi Kendalikan Narkoba Jaringan Malaysia," *Republika*, 27 September 2017: 2.
- "Narkoba Ancam Riau," *Kompas*, 9 April 2017: 15.
- "Narkoba Banyak Masuk via Laut Sumatera," *Media Indonesia*, 17 Oktober 2017: 2.
- "Narkoba Kian Ancam Masa Depan Bangsa," *Kompas*, 14 Juli 2017: 1.

- Novio, Eunice Barbara C. "PH workers abroad take risks to help families," *The Jakarta Post*, 17 April 2017: 10.
- Nugroho, Arif Satrio, "Pantai Timur Sumata Rawan Penyelundupan," *Republika*, 27 Februari 2018:3.
- Nurfatimah, Ryawantri. "Tetap Perketat Penerbitan Paspor," *Tribune Batam*, 20 Mei 2017: 21.
- Nursyamsi, Muhammad. "Kasus WNI di Luar Negeri Capai 17 Ribu," *Republika*, 2 April 2017: 3.
- _____. "300 WNI Diseksi di Arab Saudi," *Republika*, 1 April 2017: 2.
- "Pedofilia di Tengah Kita," *Republika*, 18 Maret 2017: 7.
- "Pedophiles find haven on Facebook," *The Jakarta Post*, 17 Maret 2017: 3.
- "Pemberlakuan Bebas Visa: Pelanggaran Keimigrasian Capai 4.930 Kasus," *Koran Sindo*, 18 April 2017: 4.
- "Pemerintah Bentuk Tim Kerja Penanganan TKI Ilegal di Malaysia," *Koran Tempo*, 7 Juli 2017: 7.
- "Pemerintah Diminta Cari Solus: 1,5 Juta Buruh Migran Indonesia Terancam Diusir dari Malaysia," *Rakyat Merdeka*, 10 Juli 2017: 11.
- "Penampungan TKI Digeledah," *Kompas*, 17 Mei 2017: 15.
- "Pengendali 1 Ton Sabu Ditangkap," *Suara Pembaruan*, 9 Agustus 2017: 27.
- "Penyelundup Benih Lobster Berjaringan," *Kompas*, 24 Februari 2018.
- "Penyelundupan Besar Sabu Digagalkan," *Kompas*, 24 Februari 2018: 1 & 15.
- "Penyelundupan Manusia Meningkat," *Kompas*, 12 Mei 2017: 8.
- "Perdagangan Manusia: Selama 2016, Sebanyak 10.677 WNI Jadi Korban," *Kompas*, 13 Juli 2017: 12.
- "Polisi Ungkap Sabu Rp. 1,5 Triliun dari Tiongkok," *Kompas*, 13 Juli 2017: 3.
- "Polres Tangkap Dua WN Malaysia," *Kepri Raya*, 17 Mei 2017: 19.
- "Polri Kembali Bongkar Narkoba Jaringan Malaysia," *Republika*, 17 Oktober 2017: 2.
- "Project Karma Intai Para Predator di Bali," *Kompas*, 5 September 2017: 12.
- "Ratusan Imigran Demo Minta Pindah," *Kepri Raya*, 16 Mei 2017: 17-18.
- "Razia Imigrasi Malaysia: Ratusan TKI Kabur ke Hutan," *Koran Tempo*, 6 Juli 2017: 1."
- "Ribuan Foto Diunggah: Polisi Cari Anak Korban Pelecehan Seksual di Grup Paedofil," *Kompas*, 18 Maret 2017: 27.
- "RI-Cina Perkuat Pemberantasan Narkoba," *Republika*, 5 Mei 2017: 2.

- "RI Minta Malaysia Permudah Kepulangan TKI Ilegal," *Suara Pembaruan*, 26 Juli 2017: 9.
- "Ronny Sompi Kewalahan Tangani Pekerja Ilegal Lewat jalur Tikus," *Rakyat Merdeka*, 10 Juli 2017: 10.
- Ruslan Sangadji, "No more foreigner to join MIT terror group: Police," *The Jakarta Post*, 4 April 2016: 5.
- _____. "Chinese Uighurss key players in IS-linked MIT: Police," *The Jakarta Post*, 7 Januari 2016: 3.
- _____. "No more foreigner to join MIT terror group: Police," *The Jakarta Post*, 4 April 2016: 5.
- _____. "Chinese govt offers assistance to identify Uighurs joining MIT," *The Jakarta Post*, 28 Maret 2016: 5.
- _____. "Police hunting IS leader Santoso to launch new operation," *The Jakarta Post*, 11 Januari 2016: 3.
- _____. "Chinese Uighurss key players in IS-linked MIT: Police," *The Jakarta Post*, 7 Januari 2016: 3.
- "Sabu Diselundupkan dalam Paket Kecil: Pasar Narkoba Bergeser dari Filipina ke Indonesia," *Kompas*, 26 Juli 2017: 26.
- Salim, Tama. "RI calls for strong anti-trafficking efforts," *The Jakarta Post*, 29 September 2017: 12.
- Salim, Tama and Ina Parlina. "Pakistan asks Indonesia to ease visa restriction," *The Jakarta Post*, 23 Maret 2017: 11.
- Santi, Natalia. "Jenderal Thailand Terlibat Perdagangan Manusia," *Koran Tempo*, 20 Juli 2017: 26.
- _____. "Thailand Perketat Aturan Pekerja Asing," *Koran Tempo*, 4 Juli 2017: 26.
- Santoso, Bibit. "Menyikapi Perdagangan Manusia," *Kompas*, 29 Maret 2017: 6.
- Sapiie, Marguerite Afra. "RI's war on drugs takes deadly turn," *The Jakarta Post*, 13 Maret 2017: 1.
- Saputri, Dessy Suciati dan Kamran Dikarma, "ASEAN Diserukan Jadi Solusi Dunia," *Republika*, 30 April 2017: 1.
- "Selat Malaka Rawan Penyelundupan Narkoba," *Koran Sindo*, 17 Oktober 2017: 14.
- "Selundupkan Sabu 50, 88 Gram, Ibu Rumah Tangga Ditangkap," *Kaltara Pos*, 2 Agustus 2017: 10.

- "Sindikot Global Selundupkan 5 Ton Narkotik," *Koran Tempo*, 5-6 Agustus 2017: 1.
- "Sindikot Malaysia Terbanyak," *Republika*, 28 Agustus 2017: 2.
- Sutrisno, Debbie. "Kerusakan Jauh Lebih Besar," *Republika*, 18 Maret 2017: 4.
- "Thailand Legalkan 770 Ribu Pekerja Migran," *Koran Tempo*, 22 Agustus 2017: 2.
- "Tidak Jera, WN Taiwan Selundupkan 256 Kg Sabu," *Indopos*, 27 Juli 2017: 7
- "Tiga Wali Kota Ditembak Mati," *Kompas*, 31 Juli 2017: 9.
- "Tiga Penyidik BNN Tinggalkan Nunukan," *Radat Nunukan*, 3 Agustus 2017: 1 & C\$.
- "Tim EFOR Gagalkan Penyelundupan daging Alana," *Radat Nunukan*, 3 Agustus 2017: 1 & C4
- "TKI AL Tangkap Tekong dan 14 TKI Ilegal," *Haluan Kepri*, 17 Mei 2017: 18.
- "TKI Ilegal Bakal Marak," *Kompas*, 19 Maret 2017: 10.
- "Visa Umroh Diperketat," *Koran Sindo*, 15 April 2017: 1 & 11.
- "WNI Terlibat Penculikan di Malaysia," *Kompas*, 22 Maret 2017: 4.
- "Wiranto: Perketat Aturan Pengungsi Masuk Indonesia," *Suara Karya*, 11 April 2017: 3.
- "WN AS Pelaku Kejahatan Seksual Ditolak Masuk Sulut," *Suara Pembaruan*, 15 Agustus 2017: 19.
- Yosephine, Liza. "RI stresses innovation for migrant protection," *The Jakarta Post*, 20 Maret 2017: 10.
- Wijaya, Agoeng. "BPOM Endus Mafia dalam Penyelundupan Carisoprodol." *Koran Tempo*, 19 September 2017: 12.
- "51 migrants workers nabbed over drugs," *The Jakarta Post*, 25 Maret 2017: 10.
- "7 Anggota Geng Narkoba Penyerang Perwira Polisi Ditangkap," *Suara Pembaruan*, 8-9 April 2017: 20.
- "1,2 juta Ekstasi Disita, Satu Tewas Ditembak," *Kompas*, 30 Juli 2017: 1.
- "149 WNA Penjahat Siber Dibekuk," *Kompas*, 31 Juli 2017: 1 & 15
- "50 Buruh Migran Indonesia Gabung Kelompok Radikal," *Koran Tempo*, 29-30 Juli 2017: 5.
- "2.072 WNI Jadi Korban Perdagangan Orang," *Koran Tempo*, 11 Agustus 2017: 30.

Portal

Samosir, Hanna Azarya. "Indonesia dan China Kerjasama Bendung Arus Militan Uighurs," CNN Indonesia.com, 06/01/2016, diakses pada 16 November 2016.

Daftar Wawancara dengan Informan

Zhou Shixin, Peneliti di Institute for Foreign Policy Studies, Center for Asia-Pacific Studies, Shanghai, RRC pada 2016 di Jakarta.

Rizki Indrawansayah, Program Officer on Indonesia, UNODC, di Gedung UNODC, Jakarta pada 14 Maret 2017.

Ahmad Khumaidi, Amd. Im, MPA, Kasie Kerjasama Imigrasi Kemenhukham di Gedung DPR Jakarta pada 15 Maret 2017.

Edi Pujomulyono, Direktur Pembinaan dan Penegakan Hukum Kemenaker di Gedung DPR Jakarta pada 15 Maret 2017.

M. Natsir, Ari Budiyanto, Purwanto, Victor Manurung, dari Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Bali di Bali pada 21 Maret 2017.

Ni Luh Made Wiratmi, SE, M.Si, Kabid Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, Kanwil Tenaga Kerja Provinsi Bali, Ni Luh Made Wiratmi, SE, M.Si, di Bali, pada 22 Maret 2017.

Brigjen Alit Widana, Wakapolda Bali, di Mapolda Bali, pada 22 Maret 2017.

AKBP Dekananto, Danintel Polda Bali di Mapolda Bali, pada 22 Maret 2017.

AKBP Saparini, Kabagreskrim Polda Bali, di Mapolda Bali, pada 22 Maret 2017.

Aparat BNN Provinsi Bali, di kantor BNN Bali, pada 22 Maret 2017.

Agung Krisdiyanto, Kasi Intelijen III, Bea-Cukai Provinsi Bali, NTB, dan NTT, di Kantor Bea Cukai Provinsi Bali, di Bali, pada 23 Maret 2017.

Zaeni, R. Kasi Penyelidikan dan Penindakan, Bea-Cukai Provinsi Bali, NTB, dan NTT, di Kantor Bea Cukai Provinsi Bali, di Bali, pada 23 Maret 2017.

I Negah Budawati, Wayan Suciati, dan Ketut Madani, aktivis Bali Women Crisis Center di Provinsi Bali, pada 23 Maret 2017.

Bambang Widodo, Kepala Kanwil Menkumham Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjung Pinang, pada 15 Mei 2017.

Engelbertus Rustarto, Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenhukham Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjung Pinang, pada 15 Mei 2017.

- Robert Siregar, Kasie Pengawasan Tenaga Kerja, dan Sepi Andi Bakar, Kabid Pengawasan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang, pada 16 Mei 2017.
- Kol. Sanuri, Kabidpen Korem 033/Wira Pratama Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di Tanjung Pinang, pada 15 Mei 2017.
- Yanti, Arief Fadly, dan Robby Suhendra, polisi di Satgasda *People Smuggling* di Ditreskrim Polda Kepri.
- AKBP Robertus Herry Ananto Pratiknyo, Kasubdit IV, Tindak Pidana Tertentu Polda Provinsi Kepri, di Kota Batam, pada 18 Mei 2017.
- Nixon Manurung, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri, Bubung, Kabid Pemberantasan, Edi, Kabid Umum, dan Soleh, Kepala BNNP di Kabupaten Karimun, di Kota Batam, pada 18 Mei 2017.
- Nugroho Wahyu, Kepala Kantor Bea-Cukai Batam, Revy S, Kabid Informasi, AT Cahyono, Kabid Intelijen, dan Effendy Hutahaen, Kabid Pelayanan Bea-Cukai Kota Batam, di Kota Batam, pada 16 Mei 2017.
- Kapten Ali S.W, Bagian Intelijen Lantamal XIII Tarakan, Polres Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pada 2 Agustus 2017.
- AKP Joko, Bagian Intelkam, Polres Tarakan, di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pada 2 Agustus 2017.
- Letkol (L) Pelaut Ari Aryono, Danlanal Nunukan di Mako Lanal Nunukan, pada 3 Agustus 2017.
- Brigadir Polisi Polres Nunukan, di Mako Polres Nunukan, pada 3 Agustus 2017.
- M. Farid Bisri, Kabid Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea-Cukai Nunukan, di Kantor Bea-Cukai Tipe Madya Pabean C, Nunukan, pada 4 Agustus 2017.
- AKP Ibrahim Eka Berlin, Kapolsek KSKP Nunukan, di Nunukan, pada 4 Agustus 2017.
- Inspektur Polisi Satu Khoirul Anam, Wakapolsek Nunukan, di Nunukan, pada 4 Agustus 2017.
- Kapten A. Ibrohim, Asintel Kodim 0911 Nunukan, di Mako Kodim 0911 Nunukan, pada 7 Agustus 2017.

EPILOG

Oleh: Poltak Partogi Nainggolan

Penilaian apa yang bisa diberikan terhadap dinamika hubungan internasional yang berlangsung dewasa ini? Sulit menyangkal bahwa kehadiran dan peran aktor nonnegara begitu dominan dan sangat mempengaruhi perkembangan yang terjadi dan tata dunia yang terbentuk kemudian sebagai konsekuensinya. Dapat dikatakan hampir tidak ada peristiwa yang berlangsung di dunia ini tanpa kehadiran dan keterlibatan lebih lanjut dari para aktor nonnegara, tidak hanya di tingkat domestik, tetapi juga lintas negara. Sementara, peran negara sendiri tampak semakin tergerus dan begitu dipengaruhi sikap dan responsnya oleh sepak terjang para aktor nonnegara.

Sekalipun hubungan internasional di milenium baru telah memperlihatkan peran aktor nonnegara yang semakin dominan, dalam kenyataannya, aktivitas mereka tetap memiliki keteririsan atau singgungan juga dengan peran aktor negara. Hal ini disebabkan karena peran aktor negara sebagai pelaku formal dalam membentuk peraturan dan membuat kebijakan yang masih dibutuhkan, dan juga dalam mengawasi peran para pelaku hubungan internasional. Jadi, aktor negara tetap tidak bisa meninggalkan peran tradisionalnya sebagai pengatur dan pemelihara keseimbangan dan pemberi jaminan atas terciptanya keteraturan hubungan internasional dan interaksi para aktornya. Sementara, para aktor negara menjadi pelaku lain yang tidak lagi bersifat komplementer, tetapi diketahui sudah berperan sebagai pelaku hubungan internasional aktif dan sangat dinamis peran dan interaksinya dewasa ini, dalam kondisi dunia yang semakin terhubung dan terbuka, akibat kemajuan teknologi dan derasnya globalisasi.

Realitas di berbagai belahan dunia memperlihatkan, pemerintah berbagai negara tengah menghadapi ancaman yang timbul dari begitu tingginya frekuensi kehadiran dan peran para aktor

nonnegara dengan masing-masing aktivitas mereka yang beragam. Hampir sulit disangkal, setiap negara menghadapi persoalan dengan para pendatang, yang sekadar datang ataupun yang ingin tinggal dan bekerja lebih lama, dan bahkan menetap dan bekerja lebih lama. Sumber daya alam (SDA) dan manusia (SDM) yang tidak tersebar secara merata, telah mendorong para aktor nonnegara berdatangan ke negeri-negeri yang berlimpah SDA namun langka SDM. Pendatang ilegal dan pekerja migran karenanya merupakan masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan pemerintah baik di negara maju maupun berkembang. Sementara kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih kian rawan terjadi, mulai dari penyelundupan manusia, perdagangan orang, prostitusi melibatkan anak-anak, penyelundupan komoditas impor, perdagangan narkotik dan obat-obat terlarang, serta pencurian ikan, dan lain-lain.

Di antara semua kejahatan transnasional yang semakin sering dilakukan para aktor nonnegara tersebut, penyelundupan narkoba dan aksi-aksi terorisme adalah jenis ancaman yang lebih potensial dan menakutkan terjadi di banyak negara. Hal ini disebabkan karena inovasi cara dan kreativitas para perancang dan pelaku, serta dukungan dan bantuan para simpatisan teroris, yang semakin sulit dicegah, diawasi dan ditindak, sesuai dengan hukum yang berlaku di tingkat internasional dan nasional (domestik). Masuknya pendatang atau imigran gelap, walaupun sudah dalam kategori masif dan menimbulkan kekhawatiran yang besar dalam jangka panjang, secara logis, belum dapat menyingkirkan kekhawatiran atau ancaman yang datang dari kejahatan transnasional penyelundupan narkoba dan aksi-aksi terorisme. Karena, kasus-kasus penyelundupan narkoba dan aksi-aksi terorisme yang kontinyu dan semakin canggih *modus operandi*-nya dewasa ini, jauh lebih menakutkan pemerintah di banyak negara yang menjadi sasarannya akibat implikasi secara fisiknya yang dirasakan oleh masyarakat setempat yang menjadi korbannya secara lebih luas.

EPILOG

Sekalipun aktivitas para aktor nonnegara pelakunya bisa berlainan, tetapi kasus-kasus penyelundupan narkoba dan aksi-aksi terorisme lintas-negara bisa saling berkaitan. Secara logis, dan lebih luas dapat dikatakan, kegiatan migrasi masif secara ilegal dapat memicu terjadinya kasus-kasus penyelundupan narkoba dan munculnya aksi-aksi terorisme di kemudian hari. Migrasi masif, yang disebabkan oleh kebijakan yang berbau genosida, juga mudah ditunggangi untuk aktivitas penyelundupan manusia dan perdagangan orang, prostitusi serta pedofilia oleh para aktor nonnegara yang berkepentingan. Sehingga, dapat dikatakan, sebuah kejahatan transnasional dapat berhubungan dengan satu atau lebih kejahatan transnasional lain yang dilakukan para aktor nonnegara. Semakin banyak keterkaitannya akan membuat semakin kompleks masalah dan dampak yang dihadapi setiap negara. Sementara, pemerintah negara yang dapat memahami secara lebih baik persoalan yang ditimbulkan para aktor nonnegara akan lebih mudah dapat merespons dan mencari penyelesaian (solusi), walaupun tetap membutuhkan waktu dan biaya.

Secara kritis dapat diungkapkan di sini, tidak ada sebuah negarapun yang luput dari kegiatan para aktor nonnegara, terutama yang berasal dari luar wilayahnya. Tetapi, patut pula diungkapkan kemudian bahwa tidak ada sebuah negara pun yang bisa mencari penyelesaian sendiri masalah yang diciptakan dari kegiatan para aktor nonnegara itu. Sehingga, sebagai konsekuensinya, diperlukan kerja sama antarnegara, atau yang berdimensi internasional, agar sebuah pemerintah atau negara dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh para aktor nonnegara itu, apalagi jika ingin dapat diatasi secara efektif dan cepat.

Dari perspektif teoritikal, kehadiran dan peran para aktor nonnegara yang semakin meluas dan intens kian menyadarkan pengamat dan analis atas terbatasnya teori-teori klasik hubungan internasional dalam menjelaskan realitas yang berlangsung. Adapun penyelundupan narkoba dan migrasi manusia, terutama para tenaga

kerja migran, perdagangan orang atau penyelundupan manusia merupakan jenis aktivitas para aktor nonnegara yang sangat tinggi dan banyak kasusnya ditemukan di berbagai negara di kawasan. Itulah sebabnya, dapat dipahami, mengapa respons pemerintah di negara-negara yang banyak kasus-kasusnya ditemukan, lebih jelas kelihatan dan dinamis, baik dalam merespons secara masing-masing maupun bersama-sama melalui (pembuatan) mekanisme kerja sama yang dapat disepakati.

Kehadiran dan peran para aktor nonnegara yang semakin beragam dan kompleks aktivitasnya telah berdampak pada kian rawannya kasus-kasus pelanggaran HAM terjadi di berbagai negara, termasuk di negara maju sekalipun. Segala status dan permasalahan laten terkait dengan identitas dan HAM bermunculan, jika aktivitas para aktor nonnegara yang dominan ini secara simultan terjadi di tempat (negara) dengan kondisi, yang selain padat dan kian tergerus, juga semakin terbatas SDA nasional yang dimilikinya, yang harus segera dapat dibagi atau dialokasikan secara relatif lebih adil.

Dalam kenyataannya, akibat dari eksistensi dan peran para aktor nonnegara yang kian meningkat dan dominan ini, negara-negara atau dunia menjadi semakin tidak aman memang. Namun, inilah realitas hubungan internasional dan situasi dunia pasca-berakhirnya Perang Dingin. Beragamnya pelaku hubungan internasional dan kehadiran para aktor nonnegara yang telah menggeser eksistensi dan peran aktor formal negara di milenium baru tidak menjamin terciptanya di hadapan kita sebuah dunia baru dengan kondisi yang jauh lebih baik, aman, dan damai.

INDEKS

A

Abdullah Sungkar, 148
ABK, 42, 89, 105, 189
Abu Sayyaf, 185, 188
Aceh, 14, 120, 123, 124, 125, 131,
145, 152, 188
ACTIP, 25, 33, 34, 195
AIFOCOM, 78, 79
AIPA, 78, 172
air softgun, 156
Ambalat, 188, 189
Angkatan Laut (AL), 152, 188
Al-Qaeda, 148, 149
Amerika Serikat, 38, 66, 93
ammonium nitrat, 154, 155
Amri, 92
anarki, 89, 95, 123
Anyer, 116, 170
aparatur keamanan, 52, 67, 115, 117,
122, 129, 145, 149, 160, 172,
173, 185, 188, 189
aparatur negara, 109, 119, 136, 137,
152, 173
ASEAN, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26,
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44,
54, 58, 77, 78, 79, 81, 90, 91, 92,
104, 137, 147, 158, 172, 173,
175, 184, 185, 195, 196, 198,
199
ASEANAPOL, 33, 79
ASEAN-PACTC, 32

asimetris, 95
ASOD, 33, 58
Australia, 12, 14, 87, 93, 106, 121,
137, 142, 143, 144, 145, 146,
169, 177, 178, 180, 181, 192,
193, 198
Australian Federal Police, 169, 180,
181
Avsec, 71
Azhahari, 169

B

Bakamla, 76, 129
Bakori, 188
Bali, 24, 28, 29, 54, 55, 56, 65, 68, 69,
70, 89, 97, 103, 108, 109, 110,
111, 113, 114, 117, 120, 121,
122, 123, 134, 137, 138, 139,
140, 142, 149, 153, 154, 156,
174, 178, 192
bandar, 53, 97, 116, 117, 121, 123,
125, 126, 171, 172, 176
Bandung, 141, 147
Bangladesh, 3, 4, 6, 11, 12, 19, 115,
144, 146, 147, 179
Bareskrim, 104, 111, 117, 130, 136,
144, 171
Batam, 24, 28, 71, 72, 73, 74, 76,
117, 118, 120, 125, 126, 130,
139, 141, 148, 151, 154, 155,
157, 181, 184

- Bawean, 72
 Bea-Cukai, 29, 32, 69, 71, 73, 76, 80,
 117, 119, 120, 126, 127, 129,
 154, 155, 156, 168, 169, 183
 bebas narkoba, 77
 Bekasi, 104, 130
 Benoa, 68, 122
 Bima, 149, 155
 Bintan, 120, 125, 126, 130
 BNN, 29, 52, 54, 55, 63, 64, 65, 68,
 70, 72, 73, 74, 77, 97, 115, 117,
 118, 119, 121, 122, 123, 125,
 128, 130, 131, 154, 168, 170,
 171, 173, 174, 175
 BNNP, 129
 Bom Bali, 149
 Bonanno, 92
 BPOM, 154
 Brunei, 135
 budak seks, 135
 Budi Waseso, 52, 66, 170, 171, 175
 Bulan Sabit Emas, 66
 BUMN, 108
 BVK, 106, 194
- C**
 Caledonian Sky, 190
 carisoprodol, 130, 154
 CEDAW, 10
child trades, 40
 Cianjur, 99, 105
 CIQ, 68
Citizens Scrutiny Cards, 10
Community House, 64, 134
complex emergency, 134
coral triangle, 138
cross-border, 30, 45
 CTI, 138
cyber crime, 111, 153
- D**
 darurat kompleks, 123, 134
database, 150
 Deli Serdang, 99, 168
 Densus 88,
 deportasi, 41, 101, 104, 106, 110,
 134, 140, 144, 147, 160, 161,
 167, 183, 184, 192, 193
 Derryn Hinch, 178
 DJBC, 29, 69
 Djelantik, 94
 Dompu, 149, 155
 Douglas, 91
 DPR, 55, 196
 DTW, 88, 121, 139, 141, 149, 153
 Duterte, 172, 173, 176
 Dwi Djoko Wiwoho, 184
 Dwi Widodo, 159
- E**
early warning, 150
economic security, 61
 EFOR, 157
 E-KAD, 160, 161
 ekstasi, 71, 73, 118, 120, 123, 131,
 156, 168
 ekstradisi, 130
 ekstrim, 95
 Elang Malindo, 185
Enforcement Card, 160
entertainment consultants, 139
 Entikong, 119
environmental security, 61
escort, 139
Executive Order, 172
- F**
 Facebook, 140, 141
fiber boat, 105
 Filipina, 19, 34, 58, 65, 91, 93, 112,
 117, 118, 142, 145, 149, 151,
 152, 158, 172, 173, 176, 177,
 185, 187, 189, 193, 197, 199
 Flores, 102

INDEKS

- food security*, 61
 Freddy Budiman, 118, 174
 Friedman, 59
 FTPs, 147
- G**
 Gilimanuk, 68, 122
 Glen Hulley, 178
global village, 60
 globalisasi, 30, 51, 59, 60, 66, 89, 95,
 133, 195, 200
 Gonggong Rebus, 148
good market, 53
good price, 53
 GRD, 148
- H**
 Hang Nadim, 71, 73
happy five, 73, 123
health security, 61
high profit, 30
 hukuman mati, 53, 78, 117, 121,
 163, 164, 165, 169, 181
Human Development, 61
 Hun Sen, 18
- I**
 ideologi, 96, 145
 Idi Rayeuk, 131
illegal fishing, 40, 112, 133, 150, 151,
 152, 187, 199
illegal logging, 133
illegal migrant, 99
illegal mining, 133
illegal trafficking, 99, 133, 136, 195,
 198
 ILO, 135
 imigran gelap, 39, 64, 214
 imigran mandiri, 64
 IMTA, 106, 107
 India, 6, 12, 38, 70, 73, 87, 91, 107,
 145, 154
- Indomalfil, 185
 industri hiburan, 139
 instabilitas, 89, 95
 intelijen, 76, 97, 108, 142, 150, 154
 internet, 28, 32, 114, 142, 143
 IOM, 97, 110, 134, 135, 146, 147,
 193, 196
irregular migrants, 14
 ISIS, 99, 147, 148, 149, 150, 182,
 183, 184, 185
 izin kerja, 108, 109, 179
- J**
 jalan tikus, 128, 156, 161
 jalur intersuler, 154
 jalur pelayaran, 87, 93, 155
 jalur persimpangan, 87, 196
 Jamaah Islamiyah, 148
 Jambi, 105, 130
 jaringan, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64,
 65, 66, 67, 71, 72, 80, 116, 123,
 131, 136, 142, 170, 174
 Jawa Barat, 105, 130
 Jawa Timur, 72, 103, 111
 JI, 148, 149
 jihad, 99, 184
 Johor, 125, 157
 Johor Baru, 76, 101, 126, 159
joint investigation, 45
Joint Working Group, 162
 Julie Bishop, 178
 junta militer, 18
 Justin Lunin Pack, 140
- K**
 Kalimantan Barat, 38, 119, 156, 160
 Kalimantan Selatan, 103
 Kaltara, 105
 Kamboja, 17, 18, 26, 33, 34, 125,
 167, 174, 177, 179, 180, 193
 kanim, 64, 134
 Karawang, 99

- kargo, 90, 128
 kargo internasional, 68
 Karimun, 74, 105, 119, 125, 126, 130, 166, 167
 Kauppi, 94
 keamanan ekonomi, 61
 keamanan manusia, 60, 61, 81
 kejahatan finansial, 153
 kejahatan transnasional, 25, 32, 33, 54, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 79, 133, 134, 135, 136, 188, 213, 214
 Kemenaker, 97, 107, 162
 Kemenlu, 29, 103, 164
 Kendari, 108, 114, 154
 KEP, 41
 Kepri, 38, 56, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 80, 99, 104, 105, 109, 110, 119, 120, 125, 126, 129, 130, 146, 148, 155, 166, 180, 181
 Ketapang, 122
 KJRI, 159
 KKP, 151, 152, 187
 Komisi HAM, 158, 165
 KPIS, 102, 153
 Kuala Lumpur, 17, 65, 159
 Kualanamu, 99
 Kuching, 105
 KUHP, 42, 43
 kurir, 59, 62, 65, 71, 72, 74, 117, 120, 121, 124, 128, 171
- L**
 Lanal, 185, 188, 189
 Lantamal, 105
 Laos, 18, 26, 66, 174, 177, 179
 lapas, 171
 Laut China Selatan, 52, 93
 Lembar, 122
 Lembata, 102
 Lhoksemauwe, 145
 lintas-batas, 66, 133
 lintas-negara, 31, 87, 89, 90, 91, 92, 95, 98, 102, 138, 141, 154, 189, 214
local wisdom, 114
 Lombok, 71, 99, 100, 113, 122, 141, 145, 149, 155
 LRT, 112
 LSM, 29, 172, 177
 Luhut B. Panjaitan, 190
- M**
 Mae Sot, 112, 137
major powers, 93
 Malaysia, 6, 12, 17, 18, 31, 32, 38, 53, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 91, 92, 93, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 135, 136, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 175, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 197, 198
 Maluku, 38, 151, 187
 Manado, 140, 141
 Manokwari, 108
 Marzuki Darusman, 8
 Maung Lwin, 13
 Medan, 53, 123, 124, 130, 145
 Menko Kemaritiman, 190
 MIB, 148
 migran, 3, 7, 44, 45, 90, 101, 102, 104, 105, 112, 114, 135, 137, 147, 149, 150, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 178, 179, 196, 197, 213, 215
 migrasi manusia, 3, 69, 215
 MIT, 148, 149
 mitra dialog, 78
 Moazzam Malik, 190

INDEKS

- modus, 23, 26, 41, 52, 63, 73, 74, 75,
80, 104, 129, 133, 136, 140, 142,
146, 151, 166, 168, 171, 180,
184, 214
- modus operandi*, 26, 52, 104, 129,
136, 140, 146, 166, 171, 180,
184, 214
- Molland, 92
- moratorium, 166
- MOU, 19, 108, 177, 185
- Muara Enim, 108
- multiplier effects*, 138
- Myanmar, 138
- N**
- Naga Min, 11
- Nathan, 91, 92
- National Registration Cards, 7
- Nazib Tun Razak, 162
- Ngurah Rai, 69, 123, 156
- Nigeria, 62, 63, 65, 72, 110, 134, 149
- NNCC, 173, 174, 175
- Nogales, 91
- Noordin M. Top
- NTB, 38, 69, 103, 104, 105, 149, 154
- NTT, 38, 69, 101, 136, 154
- Nunukan, 40, 105, 124, 127, 128,
136, 137, 145, 157, 161, 162,
185, 188
- one day service*, 163
- overstay*, 110, 133, 134, 147, 164,
192
- P**
- Padang Bay, 122
- pedofilia, 141, 142
- Palembang, 105, 112, 157
- Pamekasan, 99
- Papua, 24, 38, 108, 110, 153, 180,
190
- paspor, 64, 71, 100, 108, 111, 133,
140, 143, 150, 153, 156, 159,
160, 161, 162, 163, 167, 178,
184
- PBB, 8, 10, 55, 57, 97, 172, 176, 180,
194
- PCC, 130, 154
- PDRM, 75, 157
- pekerja migran, 44, 102, 104, 105,
112, 114, 135, 137, 158, 159,
161, 162, 163, 164, 167, 178,
179, 196, 213
- pelabuhan tradisional, 127, 128,
136, 153, 161
- Pelapor Khusus, 10
- peminta suaka, 143, 193
- Penang, 124, 125, 159
- pencurian ikan, 133, 150, 151, 152,
187, 188, 198
- penerbangan internasional, 69, 88
- pengedar, 59, 62, 64, 65, 97, 116,
117, 119, 123, 126, 130
- Pengerang, 157
- pengungsi, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 64, 89, 110, 133, 134,
143, 144, 145, 146, 149, 158,
165, 179, 180, 187, 192, 193,
194
- pengungsi mandiri, 134, 146
- penyelundupan, 32, 40, 41, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62,
63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 92, 94, 97, 99, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 131, 133,
136, 137, 140, 144, 146, 153,
154, 155, 156, 157, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 176, 178,
179, 180, 181, 188, 195, 198,
213, 214, 215
- people centered*, 61
- people smuggling*, 133, 146, 180, 181
- Perang Dingin, 30, 95, 216

- perdagangan manusia, 14, 23, 24,
25, 33, 34, 41, 42, 44, 92, 95,
100, 104, 135, 136, 138, 179,
180, 181
- perdagangan orang, 16, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44,
92, 94, 103, 104, 112, 134, 135,
136, 137, 140, 167, 179, 180,
188, 195, 196, 197, 213, 214,
215
- Perlak, 124
- perompak, 189
- pertumbuhan penduduk, 61, 93, 96
- PLB, 150
- PLTU, 109
- PM Lee, 17
- PMA, 108, 111
- police to police*, 183
- Polisi Air, 129, 185
- Polisi Diraja, 183
- political security*, 61
- Polri, 26, 97, 104, 111, 130, 144,
157, 168, 169, 171, 181, 183
- Pontian, 105
- pornografi, 141
- Project Karma, 177, 178
- properti, 97, 113, 114
- Proses Bali, 137
- proxy war*, 121
- PSK, 97, 135, 136, 138, 139, 140
- Pulau Rupert, 74
- Pulau Tenggara, 189
- R**
- R2P, 17
- Raja Ampat, 138, 190, 191, 192
- rantai pasokan, 138
- ratifikasi, 33, 34, 36, 44, 144, 145,
192, 193, 194, 195, 196
- Renshaw, 92
- Retno LP Marsudi, 23
- Riau, 73, 74, 120, 145
- risiko komersial, 138
- Robert-Wayan, 113
- Rohingya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18
- RRT, 38
- rudenim, 64, 134, 146, 147, 180
- S**
- Sabah, 40, 145, 159, 160
- safe house*, 186
- Sahni, 95, 96
- Samarinda, 171
- Sam Ratulangi, 140
- Samudera Pasifik, 87
- Segi Tiga Emas, 66
- Selat Malaka, 93, 124, 145, 188
- Serang, 52, 99, 116
- Serawak, 12, 105
- sindikatan Malaysia, 117
- Singapura, 17, 18, 24, 31, 33, 34, 38,
65, 77, 79, 97, 99, 102, 103, 106,
121, 123, 130, 135, 142, 144,
146, 148, 154, 157, 163, 167,
177, 182, 184, 192
- Soetta, 147
- SOMTC, 25, 44
- Sukmanto, 25
- Sumatera Utara, 99, 123, 124, 141,
155, 188
- Surabaya, 24, 63, 71, 73, 111, 126
- Suriah, 99, 136, 146, 148, 149, 150,
182, 184
- Susi Pujiastuti, 150, 187, 199
- sweeping*, 7, 197
- T**
- TAC, 17
- Tanjung Balai, 74, 120, 155, 166
- Tanjung Pinang, 28, 109, 120, 146,
154
- Tanjung Priok, 117, 154

INDEKS

- Tarakan, 128, 171, 185
 Tawau, 127, 160, 171, 185
 tekong, 105
 tempat persinggahan, 87
 terorisme internasional, 61, 147,
 177, 182, 183
 Thailand, 6, 11, 12, 17, 18, 33, 34, 53,
 65, 66, 79, 91, 92, 110, 112, 131,
 135, 137, 142, 158, 167, 173,
 177, 178, 179, 181, 182, 187,
 188, 189, 197
 Timur-Tengah, 14, 87, 99, 100, 104,
 110, 134, 135, 139, 143, 144,
 145, 148, 149, 150, 166, 184,
 197
 Tiongkok, 125
 TNI, 99, 104, 105, 156, 163
 TPPO, 38, 42, 43, 103, 137
 transferabilitas komoditi, 39
 transit, 35, 36, 87, 89, 105, 118, 119,
 122, 125, 128, 133, 134, 143,
 144, 145, 146, 147, 149, 154,
 179, 193
 Turki, 66, 99, 103, 115, 182, 183,
 184
- U**
 Uighurs, 149
 UKM, 138
 umrah, 42, 104, 166
 UNHCR, 10, 64, 110, 133, 134, 145,
 146, 193
 UNICEF, 4, 136
 UNODC, 55, 56, 62, 63
- V**
 Vietnam, 18, 25, 26, 34, 53, 79, 97,
 151, 152, 177, 187
 Viotti, 94
 visa, 99, 104, 106, 109, 110, 111,
 133, 134, 143, 147, 153, 159,
 166, 194
- W**
 Warung Kamtibmas, 162
 WhatsApp, 141
 Wira Pratama, 109
 Wiranto, 193
 WNA, 87, 106, 110, 111, 112, 113,
 114, 128, 129, 144, 146, 166,
 176, 194
 WNI, 23, 27, 42, 63, 72, 100, 103,
 111, 113, 117, 121, 123, 128,
 129, 135, 136, 136, 148, 150,
 157, 159, 163, 164, 165, 182,
 183, 184
working group, 58, 162
- X**
X-Ray, 71, 127, 168
- Y**
yacht, 122
- Z**
 Zamshari Shaharan, 162
 zona merah, 119, 120

TENTANG PENULIS

Dinna Wisnu, Ph.D adalah Lektor Kepala (*Associate Professor*) bidang Hubungan Internasional dan Politik, dan dipilih oleh Menteri Luar Negeri RI atas pemerintah RI sebagai wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right (2016-2018). Pada tahun 1999 menyelesaikan studi S-1 di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional dan pada tahun 2001 melanjutkan studi S-2 dan S-3 dengan beasiswa penuh di dan dari The Ohio State University di Columbus, Amerika Serikat di Department of Political Science. Gelar Master of Arts diperolehnya pada tahun 2004 dan gelar Ph.D pada 2007. Fokus penelitian adalah diplomasi, ASEAN, politik ekonomi pembangunan, dan jaminan sosial, ia tidak hanya berkarya sebagai akademisi yang mendirikan sejumlah program studi dan pusat studi di 3 universitas: Universitas Indonesia, Universitas Paramadina, dan Unika Atma Jaya Jakarta, ia juga dilibatkan dalam rangkaian kegiatan pelatihan dan pembentukan kebijakan luar negeri dan kebijakan sosial. Dikenal produktif sebagai kolumnis di berbagai media massa, ia juga menulis berbagai karya ilmiah antara lain buku *Politik Sistem Jaminan Sosial* (2012, Gramedia Pustaka Utama), “Ambitious but Inadequate: Social Welfare Policies under Yudhoyono” dalam buku *Yudhoyono Presidency* (2015, ISEAS Singapore), “Book Review, Forgotten People: Poverty, Risk and Social Security in Indonesia, Case of the Madurese” (2015, Bulletin of Indonesian Economic Studies), “Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional: Bukan Soal Keterbatasan Fiskal” (2015, *Jurnal Analisis Sosial*), “Managing Conflicts in East and Southeast Asia”

TENTANG PENULIS

(2013, *Strategic Review*), dan “Risk and Social Protection in Indonesia, the Philippines and Singapore” dalam *Bridging Disciplines, Spanning the World: Approaches to Inequality, Identity and Institutions* (2006, Princeton USA).

Poltak Partogi Nainggolan, MA, Dr. phil., Prof. adalah Peneliti Utama/IV-e dan *Research Professor* untuk Masalah-Masalah Hubungan Internasional di Pusat Penelitian di DPRRI. Pada tahun 1986 menyelesaikan studi S-1 di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Jurusan Hubungan Internasional, Program Studi Perbandingan Politik. Pada tahun 1999 menyelesaikan studi pasca-sarjana (S-2) di *Graduate School of Political Science and International Relations* di *The University of Birmingham*, Inggris, bidang *Security Studies*. Pada Februari tahun 2011 menuntaskan program doktoral ilmu politik di *Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg*, Jerman, dengan tesis *The Indonesian Military Response to Reform during Democratic Transition: A Comparative Analysis of Three Civilian Regimes 1998-2004*. Menulis buku antara lain *Reformasi Struktur Ekonomi RRC Era Deng Xiao-ping*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995; Co-penulis dan editor buku *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta, Yayasan API, 2001; *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial*, Jakarta: Tiga Putra Utama, 2004; serta buku-buku lain, di antaranya, yang terbaru *Indonesia dan Kemitraan Strategis dalam Hubungan Internasional*, Jakarta: Azza Grafika, 2013, *Keamanan Maritim di Kawasan*, Jakarta: Azza Grafika 2014, dan *Agenda Poros Maritim Dunia dan Respons dan Perubahan Lingkungan Strategis*, Jakarta: Azza Grafika, 2015, dan *Indonesia di Tengah Kebangkitan China, Jepang dan India*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016. Ia dapat dihubungi di alamat email: pptogin@yahoo.com.

Simela Victor Muhamad, Drs, M.Si adalah Peneliti Madya bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian di

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI). Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada 1986. Menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana (S-2) Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia, pada 1999. Aktif sebagai peneliti bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian di DPRRI dan bertugas memberikan dukungan substansi yang terkait dengan masalah-masalah hubungan internasional kepada Anggota DPRRI baik untuk keperluan Rapat-rapat Kerja dengan Pemerintah maupun untuk sidang-sidang keparlemenan internasional.

Sita Hidriyah, S.Pd.,M.Si., menyelesaikan pendidikan S-1 Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2005 dan pendidikan S-2 Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian di DPRRI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Peningkatan Kerja Sama Pembangunan Negara Indonesia dan Australia pada Penanggulangan Bencana” (2013), “Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia” (2014), dan “ASEAN dan TKI Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015” (2014).